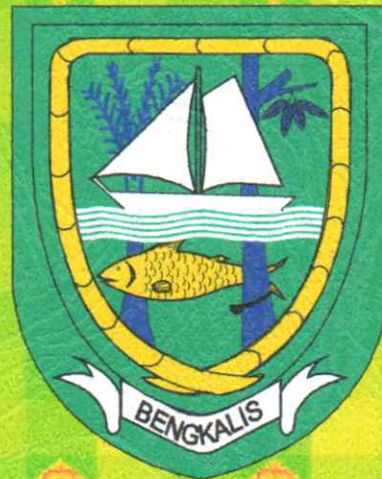


PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA



**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)**



**KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA**

RENJA PD

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2024
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh berkat rahmat, taufik dan hidayatnya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karna itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Tenggayun, Januari 2023

KECAMAT BANDAR LAKSAMANA

TAUFIK HIDAYAT, SSTP, MPA
PEMBINA
NIP. 19821205 200212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
LAMPIRAN.....	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstran	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT PERANGKAT DAERAH.....	15
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	15
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	16
3.3 Program, kegiatan dan sub kegiatan.....	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB V PENUTUP.....	19

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.....	11
TABEL 2.3 Tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024.....	13
TABEL 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2024.....	17
TABEL 3.2 Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024.....	17
TABEL 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	18

LAMPIRAN

Halaman

TABEL Pemetaan Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Untuk Tahun 2024 Terhadap Program/Kegiatan/Subkegiatan Pemuktahiran Permendagri NO.90 Tahun 20019 (KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	20
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran kerja tahunan dari setiap Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen yang akan dibahas pada Forum SKPD yang nantinya merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dearah. Maka keberadaan Undang-undang tersebut sebagai salah satu produk hukum menjadi alat penting dan strategis dalam merespon berbagai tuntutan perubahan kearah pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan Rencana Pembangunan Tahunan bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, subkegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Adapun penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selanjutnya Renja ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan pada tahap berikutnya RKA

tersebut akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut, serta untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), serta lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas maupun fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016, dibentuklah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam mengimplementasikan kinerjanya yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas Kinerja, maka disini dapat disajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani perencanaan tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2024 merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Bengkalis dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan SKPD Kecamatan Bandar Laksamana. Renja SKPD disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja SKPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran *clean government* dan *good governance*.

Dalam hal pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Selaras dengan ketentuan tersebut, sistem pembangunan yang demikian diharapkan akan dapat menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi

antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kecamatan Bandar Laksamana dengan mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat sehingga terwujudnya pembangunan di Kecamatan Bandar Laksamana khususnya dan Kabupaten Bengkalis umumnya secara berkeadilan, efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 telah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Otonomi Daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dengan memperhatikan potensi dan keuangan daerah. Hal ini dikuatkan dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Bandar Laksamana diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
- 17) Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar laksamana, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 21) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis;
- 22) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kantor Camat Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 24) Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor: 050/BAPPEDA-PPEPD/003/2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Kecamatan Bandar Laksamana dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
- b. Menyediakan suatu tolok ukur atau standarisasi pencapaian kinerja Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan serta memperbaiki kinerja dimasa mendatang setiap PD.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Bandar Laksamana sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bandar Laksamana dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan subkegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Bandar Laksamana untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, kegiatan dan subkegiatan operasional tahunan.
- f. Memberikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Bandar Laksamana adalah :

- a. Tersusunnya perencanaan untuk memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana.
- b. Tersusunnya perencanaan sebagai dasar utama bagi setiap bagian dalam menyusun program, kegiatan dan subkegiatan kedepan sesuai dengan potensi yang ada dan kemampuan dana yang tersedia.

- c. Tersusunnya perencanaan Kantor Camat Bandar Laksamana yang komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandar Laksamana Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman dan arah kerja Pemerintah Kecamatan Bandar Laksamana, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Bandar Laksamana tahun 2021-2026 yang memiliki keterkaitan dengan Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”.

Bermarwah merupakan suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan. Maju merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya semua kebutuhan baik pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang professional dan berwibawa. Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil dan merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.

2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandar Laksamana yaitu pada Misi II, yaitu:

“Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter”

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis yang tersedia untuk Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 9.789.038.436,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 9.193.271.746,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **93,91%** dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Kecamatan Bandar Laksamana kondisi anggaran Silpa adalah **Rp. 595.766.690,00**. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Kecamatan Bandar Laksamana telah menggunakan anggaran Belanja sebesar **Rp. 9.789.038.436,00** (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi **Rp. 9.193.271.746,00** (Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau secara persentase mencapai **93,91%** Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis

Secara keseluruhan total anggaran yang dapat direalisasikan dalam bentuk belanja pada Tahun 2022 mencapai sekitar **93,91%** dengan Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran RKP	KODE	Uraian/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Tridulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022	Peringkat Daerah Penanggung									
								I			II			III			IV						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
02.			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.481.124.088,00		864.616.400,00	161.411.000,00	236.380.000,00	187.709.280,00	290.690.000,00		876.190.280,00		876.190.280,00		876.190.280,00														
02.2.01.			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan					115.011.000,00	213.380.000,00	153.921.000,00	236.890.000,00		719.202.000,00		719.202.000,00		719.202.000,00														
02.2.01.01.			Koordinasi/Strang Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta muarebang tingkat kecamatan	36 unsur kelom pok	123.000.000,00	15.053.000,00	15.093.000,00	0 unsur kelompok ok	0 unsur kelompok ok	0 unsur kelompok ok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093.000,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093.000,00	6,00	15.093.000,00	16,67	12,21			
02.2.01.02.			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan	72 Kegiat an	3.630.859.000,00	605.143.000,00	99.948.000,00	213.380.000,00	153.921.000,00	236.890.000,00		704.106.000,00		704.106.000,00		704.106.000,00	16,00	16,00	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	0	0	0	704.106.000,00	16,00	704.106.000,00	22,22	19,39	
02.2.02.			Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					23.000.000,00	23.000.000,00	27.788.280,00	26.900.000,00		100.688.280,00		100.688.280,00		100.688.280,00														
02.2.02.03.			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	48 Orang	916.726.086,00	130.060.460,00	23.000.000,00	23.000.000,00	27.788.280,00	26.900.000,00		100.688.280,00		100.688.280,00		100.688.280,00	8,00	8,00	8 orang	8 orang	8 orang	0	0	0	100.688.280,00	8,00	100.688.280,00	16,67	10,95	
02.2.04.			Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang disampaikan kepada Camat					23.400.000,00	23.400.000,00	6.000.000,00	26.900.000,00		56.300.000,00		56.300.000,00		56.300.000,00														
02.2.04.03.			Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang disampaikan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang disampaikan	18 Kegiat an	805.940.000,00	134.460.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	6.000.000,00	26.900.000,00		56.300.000,00		56.300.000,00		56.300.000,00	11,00	11,00	5 laporan	5 laporan	5 laporan	0	0	0	56.300.000,00	11,00	56.300.000,00	61,11	6,98	
Total Realisasi Capaian Kinerja per Program (%)								36,75	37,90	46,75	52,81	73,50	59,96	98,50	79,82	51,66	12,38														
Prediksi Kinerja Program																															

No.	Sasaran RKP	KODE	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trivulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Peringkat Daerah Penanggung											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1		06.2.01.16.	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah Desa yang dibina APBDes	42 Desa	88.699.000,00	0	7 desa	10.022.400,00	0 desa	0,00	0 desa	7.132.400,00	0 desa	0,00	0,00	7 desa	11.930.000,00	7,00	19.092.400,00	7,00	19.092.400,00	7,00	19.092.400,00	15 = 14/6 x 100%	15,19	15										
Total Rate-Rate Capaian Kinerja per Program (%)										80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
Predikat Kinerja Program										Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik					
Total Rate-Rate Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)										24,24	20,80	32,88	29,47	87,24	23,88	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	
Predikat Kinerja OPD										Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya APBD dan Pagu Anggaran yang besar untuk menjalankan Program dan Kegiatan OPD Kec. Bandar Laksamana dalam satu tahun Anggaran

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih rendahnya pemahaman aparat tentang mekanisme penyusunan evaluasi renja perangkat daerah

Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya *) :

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Diusun,
Bengkalis, - Januari - 2023
Caiat Bandar Laksamana



IAI KHIDAYAT, S.S.T, MPA
Pembina
NIP.: 19821205 200212 1 001

Dievaluasi,
Bengkalis, - Januari - 2023
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



RINTO, SE, M.Si.
Pembina
NIP. : 19610601 200903 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah. Capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Bandar Laksamana merupakan Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana, baik yang terkait dengan pelayanan rekomendasi perijinan, administrasi persuratan dan lain-lain. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bandar Laksamana menyelenggarakan 1 Urusan yaitu:

- Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan beberapa capaian indikator.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat	%			85,25	86	87	90	95	95	86,34	83,41	88,25	89,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Laksamana telah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana, dapat dipetakan isu-isu penting yang perlu ditindak lanjuti dalam penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan *stakeholder* terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif,
2. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir yang dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu sebagai modal *database* dalam menyusun perencanaan pembangunan. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan personil yang dinamis dalam melakukan *collecting data*, rekapitulasi data dan penyusunan *database*.
3. Pemerataan pembangunan fisik sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga lokal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Kecamatan Bandar Laksamana telah sejalan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkalis, adapun perubahan yang terjadi hanya pada besaran pagu anggaran dari masing-masing program dan kegiatan. Adapun terjadinya perbedaan pagu anggaran tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan standarisasi dari harga barang dan jasa serta honorarium kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan dari item masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program, kegiatan dan subkegiatan prioritas Kecamatan Bandar Laksamana yang tercantum pada RKPD 2024 dan selanjutnya menyesuaikan dengan regulasi terbaru terhadap program, kegiatan dan subkegiatan untuk tahun 2024;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bandar Laksamana yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program, kegiatan dan subkegiatan di Kecamatan Bandar Laksamana yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2024;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Bandar Laksamana antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Bandar Laksamana berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Adapun tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
 KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS

Kecamatan Bandar Laksamana

Kode	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7 01	KECAMATAN	Kec. Bandar Laksamana			8.900.848.604,00						
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bandar Laksamana	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi kantor (jumlah dan Keprgawalan)	100%	5.951.367.924						
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bandar Laksamana	Persentase Pelaporan dan evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100%	89.000.900						
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	82.500.900						
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.000.000						
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.500.000						
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bandar Laksamana	Persentase terwujudnya Penatausahaan Keuangan Yang baik	100%	2.600.000.000						
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang / 12 Bulan	2.600.000.000						
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Kec. Bandar Laksamana	Persentase Tepeliharanya barang Milik daerah	100%	115.200.000						
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	115.200.000						
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bandar Laksamana	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	100%	99.872.000						
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	99.872.000						
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bandar Laksamana	Persentase Pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	655.183.800						
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	21.500.000						
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	77.500.000						
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	61.795.000						

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	53.066.800			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	30.000.000			
7	01	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	341.722.000			
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	69.600.000			
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bandar Laksamana	Persentase Pemenuhan Prasarana dan sarana Termasuk Pemeliharaan	100%	1.405.777.224			
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	152.416.000			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	152.500.000			
7	01	01	2.07	08	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	800.000.000			
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	300.861.224			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bandar Laksamana	Persentase Pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan	100%	505.900.000			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	235.400.000			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	227.000.000			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	43.400.000			
7	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bandar Laksamana	Persentase Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100%	480.534.000			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	183.384.000			
7	01	01	2.09	08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.200.000			
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	46.950.000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bandar Laksamana	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	1.036.290.480			

7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bandar Laksamana	100%	873.000.000	673.000.000				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bandar Laksamana	7 Laporan	23.000.000					
7 01 02 2.01 02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Bandar Laksamana	15 Dokumen	650.000.000					
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Bandar Laksamana	80%	113.290.480					
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bandar Laksamana	12 Laporan	113.290.480					
7 01 02 2.04	pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bandar Laksamana	100%	250.000.000					
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bandar Laksamana	12 Laporan	250.000.000					
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bandar Laksamana	100%	1.168.425.200					
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bandar Laksamana	100%	1.018.425.200					
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bandar Laksamana	3 Laporan	1.018.425.200					
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Bandar Laksamana	100%	150.000.000					
7 01 03 2.06 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec. Bandar Laksamana	25 Keluarga	150.000.000					
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bandar Laksamana	100%	144.530.000					
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Bandar Laksamana	100%	24.530.000					
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bandar Laksamana	12 Laporan	24.530.000					
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bandar Laksamana	100%	120.000.000					
7 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Bandar Laksamana	12 Laporan	120.000.000					

7 01 05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bandar Laksamana	persentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	100%	568.235.000			
7 01 05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bandar Laksamana	persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat	100%	568.235.000			
7 01 05	2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Blmtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Blmtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 Orang	80.000.000			
7 01 05	2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	320.000.000			
7 01 05	2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	158.235.000			
7 01 06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bandar Laksamana	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik	100%	42.000.000			
7 01 06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bandar Laksamana	persentase pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang dilaksanakan	100%	42.000.000			
7 01 06	2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	24.500.000			
7 01 06	2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Bandar Laksamana	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7 Dokumen	17.500.000			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja.

Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun Perangkat Daerah lainnya. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Bandar Laksamana sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Rancangan rencana kerja Kecamatan Bandar Laksamana didiskusikan dalam pembahasan Forum RKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang berhubungan langsung dengan pelayanan secara langsung di Kecamatan Bandar Laksamana adalah nihil. Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, sebagai Perangkat Daerah yang hanya melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, disamping melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, juga meliputi aspek koordinasi pada lingkup Kecamatan Bandar Laksamana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Renja Kecamatan Bandar Laksamana lebih banyak berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat pelayanan pemerintahan untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Renja Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, telah mengikuti hasil sinkronisasi terhadap program prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD 2021 – 2026. Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, sekaligus mengawal RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Renja Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis lebih banyak berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat perencanaan makro untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dalam menyusun perencanaan harus mengacu pada visi dan misi kepala daerah tahun 2021-2026 yang telah tertuang sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan visi, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**. Berdasarkan visi tersebut maka dapat dirumuskan dengan 3 (tiga) misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter;
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Penjabaran dari visi dan misi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Daerah yang efektif berkeadilan dan tepat sasaran
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Melayani dan Inovatif
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Penataan Infrastruktur dan Kawasan Pemukiman
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
6. Peningkatan Kualitas Pemahaman Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal
7. Sinergitas kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Stakeholder lainnya.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bandar Laksamana yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Bandar Laksamana. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
TAHUN 2024

Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.	1. Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan pemerintah.	1. Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	90

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan pada Renja Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 tertuang pada tabel Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU 2025**

KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				8.900.848.604,00				9.100.847.704,00
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi kantor (umum dan Kepegawaian)	Kec. Bandar Laksamana	100%	5.961.367.924	APBD		100%	6.161.367.024
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan dan evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kec. Bandar Laksamana	100%	89.000.900	APBD		100%	89.000.000
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bandar Laksamana	3 Dokumen	82.500.900	APBD		3 Dokumen	83.000.000
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bandar Laksamana	6 Laporan	4.000.000	APBD		6 Laporan	3.500.000
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bandar Laksamana	3 Laporan	2.500.000	APBD		3 Laporan	2.500.000
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Penatausahaan Keuangan Yang baik	Kec. Bandar Laksamana	100%	2.600.000.000	APBD		100%	2.800.000.000
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bandar Laksamana	18 Orang / 12 Bulan	2.600.000.000	APBD		18 Orang / 12 Bulan	2.800.000.000
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tepeliharanya barang Milik daerah	Kec. Bandar Laksamana	100%	115.200.000	APBD		100%	115.200.000
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Bandar Laksamana	6 Dokumen	115.200.000	APBD		6 Dokumen	115.200.000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Kec. Bandar Laksamana	100%	99.872.000	APBD		100%	99.872.000
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bandar Laksamana	18 Orang	99.872.000	APBD		18 Orang	99.872.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bandar Laksamana	100%	655.183.800	APBD		100%	655.183.800
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bandar Laksamana	10 Paket	21.500.000	APBD		10 Paket	21.500.000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Bandar Laksamana	35 Paket	77.500.000	APBD		35 Paket	77.500.000

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7 01 01 2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Bandar Laksamana	2 Paket	81.795.000	APBD		2 Paket	81.795.000
7 01 01 2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bandar Laksamana	10 Paket	53.066.800	APBD		10 Paket	53.066.800
7 01 01 2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Bandar Laksamana	2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen	30.000.000
7 01 01 2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bandar Laksamana	12 Laporan	341.722.000	APBD		12 Laporan	341.722.000
7 01 01 2.06	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Bandar Laksamana	3 Dokumen	69.600.000	APBD		3 Dokumen	69.600.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan sarana Termasuk Pemeliharaan	Kec. Bandar Laksamana	100%	1.406.777.224	APBD		100%	1.406.777.224
7 01 01 2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Bandar Laksamana	4 Unit	152.416.000	APBD		3 Unit	152.416.000
7 01 01 2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Bandar Laksamana	12 Unit	152.500.000	APBD		12 Unit	152.500.000
7 01 01 2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Bandar Laksamana	2 Unit	800.000.000	APBD		2 Unit	800.000.000
7 01 01 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Bandar Laksamana	20 Unit	300.861.224	APBD		26 Unit	300.861.224
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan	Kec. Bandar Laksamana	100%	506.800.000	APBD		100%	506.800.000
7 01 01 2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bandar Laksamana	12 Laporan	235.400.000	APBD		12 Laporan	235.400.000
7 01 01 2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Bandar Laksamana	12 Laporan	227.000.000	APBD		12 Laporan	227.000.000
7 01 01 2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Bandar Laksamana	3 Laporan	43.400.000	APBD		3 Laporan	43.400.000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Kec. Bandar Laksamana	100%	480.834.000	APBD		100%	480.834.000
7 01 01 2.09	02 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Kec. Bandar Laksamana	3 Unit	183.394.000	APBD		3 Unit	183.394.000
7 01 01 2.09	06 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Bandar Laksamana	2 Unit	250.200.000	APBD		2 Unit	250.200.000
7 01 01 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Bandar Laksamana	2 Unit	46.950.000	APBD		2 Unit	46.950.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec. Bandar Laksamana	80%	1.036.290.480	APBD		80%	1.036.290.480
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya kegiatan Musyawarah Pembangunan	Kec. Bandar Laksamana	100%	673.000.000	APBD		100%	673.000.000

-1		-2		-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bandar Laksamana	7 Laporan	23.000.000	APBD	7 Laporan	23.000.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peninjauan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bandar Laksamana	15 Dokumen	650.000.000	APBD	15 Dokumen	650.000.000
7	01	02	2.02	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya Pelayanan Kedinmas	Kec. Bandar Laksamana	80%	113.290.480	APBD	80%	113.290.480
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bandar Laksamana	12 Laporan	113.290.480	APBD	12 Laporan	113.290.480
7	01	02	2.04		pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Koordinasi	Kec. Bandar Laksamana	100%	250.000.000	APBD	100%	250.000.000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bandar Laksamana	12 Laporan	250.000.000	APBD	12 Laporan	250.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec. Bandar Laksamana	100%	1.168.425.200	APBD	100%	1.168.425.200
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan Partisipasi masyarakat	Kec. Bandar Laksamana	100%	1.018.425.200	APBD	100%	1.018.425.200
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bandar Laksamana	3 Laporan	1.018.425.200	APBD	3 Laporan	1.018.425.200
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kec. Bandar Laksamana	100%	150.000.000		100%	150.000.000
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec. Bandar Laksamana	25 Keluarga	150.000.000		25 Keluarga	150.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan Kantibmas	Kec. Bandar Laksamana	100%	144.530.000	APBD	100%	144.530.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	Kec. Bandar Laksamana	100%	24.630.000	APBD	100%	24.630.000
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bandar Laksamana	12 Laporan	24.530.000	APBD	12 Laporan	24.530.000
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	Kec. Bandar Laksamana	100%	120.000.000	APBD	100%	120.000.000
7	01	04	2.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Bandar Laksamana	12 Laporan	120.000.000	APBD	12 Laporan	120.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Kec. Bandar Laksamana	100%	558.235.000	APBD	100%	558.235.000

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat	Kec. Bandar Laksamana	100%	568.235.000	APBD		100%	568.235.000
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bandar Laksamana	25 Orang	80.000.000	APBD		25 Orang	80.000.000
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bandar Laksamana	65 Orang	320.000.000	APBD		65 Orang	320.000.000
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bandar Laksamana	2 Dokumen	158.235.000	APBD		2 Dokumen	158.235.000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik	Kec. Bandar Laksamana	100%	42.000.000	APBD		100%	42.000.000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Kec. Bandar Laksamana	100%	42.000.000	APBD		100%	42.000.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bandar Laksamana	7 Dokumen	24.500.000	APBD		7 Dokumen	24.500.000
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Bandar Laksamana	7 Dokumen	17.500.000	APBD		7 Dokumen	17.500.000
TOTAL JUMLAH BELANJA URUSAN					8.900.848.604,00				9.100.847.704,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bandar Laksamana tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan dan subkegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Kerja Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2024 sebagai acuan bagi Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya Adapun rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bandar Laksamana disajikan pada Tabel berikut ini:

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Bandar Laksamana tahun anggaran 2024 ini disampaikan kepada Bupati Bengkalis sebagai wujud pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis dan sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) ini dibuat dalam rangka memenuhi amanat peraturan yang berlaku, Renja PD ini juga harus didukung penganggaran dari Pemerintah daerah dan diharapkan sesuai dengan usulan program dan kegiatan yang diusulkan. Jika usulan ini disesuaikan atau dirasionalkan supaya tidak mengubah hal- hal yang substansi dari yang diusulkan. Jika terdapat perbedaan persepsi antara SKPD dengan TAPD diharapkan komunikasi yang intens sebagai jalan penyelesaian.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Kinerja Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaannya dimasa yang akan datang.

Apa yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Kiranya Renja Kecamatan Bandar Laksamana Tahun Anggaran 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Bandar Laksamana.

Tenggayun, Januari 2023

KECAMAT BANDAR LAKSAMANA



**TAUFIK HIDAYAT, SSTP, MPA
PEMBINA
NIP. 19821205 200212 1 001**

**PEMETAAN
PROGRAM /KEGIATAN RENSTRA KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA UNTUK TAHUN 2024 TERHADAP
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NO.090 TAHUN 2019
(KEMPENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)**

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA		PEMUTAKHIRAN KEMPENDAGRI 050-5889 2021											
RENSTRA KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA UNTUK TAHUN 2023		PROGRAM PENUJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
UNSUR KEMILAYAHAN	7 01 01	PROGRAM PENUJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pemenuhan Layanan administrasi kantor (umum dan Kepegawalan)						PROGRAM PENUJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7 01 01	UNSUR KEMILAYAHAN
	7 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan dan evaluasi Kinerja Tepat Waktu							7 01 01 2.01	
	7 01 01 2.01 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 01 01 2.01 01	
	7 01 01 2.01 06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 01 01 2.01 06	
	7 01 01 2.01 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil dan Monografi yang Dievaluasi	Dokumen	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 01 01 2.01 07	
	7 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terwujudnya Penatausahaan Keuangan Yang baik							7 01 01 2.02	
	7 01 01 2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi nya Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai	Tahun/Bulan	Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 01 01 2.02 01	
	7 01 01 2.02 07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah dokumen dalam Penyusunan Pelaporan akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD				7 01 01 2.02 07	
	7 01 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat		Persentase Tepeliharanya barang Milik daerah							7 01 01 2.03	
	7 01 01 2.03 02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa Tenaga Keamanan Kantor	Orang	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7 01 01 2.03 02	
	7 01 01 2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kompetensi ASN							7 01 01 2.05	
	7 01 01 2.05 01			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Jasa Pengisi Acara Instruktur Senam	Orang	Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				7 01 01 2.05 01	

7 01	04	2.03	Penyelenggaraan Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persentase meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	Kegiatan	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi Upang- Penyelenggaraan Ketentrangan dan Ketertiban Umum	7 01	04	2.03
7 01	04	2.03 02		Jumlah kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		7 01	04	2.03 02
7 01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7 01	05	
7 01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	7 01	05	2.01
7 01	05	2.01 02		Jumlah kegiatan koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		7 01	05	2.01 02
7 01	05	2.01 03		Jumlah hari besar nasional / daerah yang diselenggarakan	Kegiatan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		7 01	05	2.01 03
7 01	05	2.01 08		Jumlah desa dalam pembinaan bersama forum koordinasi kecamatan	Jumlah Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		7 01	05	2.01 08
7 01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7 01	06	
7 01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang dilaksanakan					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 01	06	2.01
7 01	06	2.01 02		Jumlah desa dengan tertib administrasi sesuai standar dan berkinerja baik	Jumlah Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		7 01	06	2.01 02
7 01	06	2.01 16		Jumlah desa yang dibina APBDes	Jumlah Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		7 01	06	2.01 16

